

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu akuntansi terdapat prinsip konservatif yang diartikan sebagai menjaga kehati-hatian. Maka dari itu dalam pelaporan keuangan ada hal yang tidak boleh dilewatkan yaitu bukti transaksi. Prinsip tersebut berlaku pada setiap pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang bernilai seperti, uang atau barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik didalamnya terdapat prinsip penting yaitu transparansi dalam pelaporan keuangan (Rizky Amalia Sugista, 2017).

Undang-undang republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Hal tersebut menarik perhatian terhadap peningkatan perkembangan transparansi di Indonesia. Pemerintah dituntut agar mampu menyediakan semua informasi yang relevan secara jujur dan terbuka terhadap masyarakat karena kegiatan pejabat publik adalah menjalankan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Dalam undang-undang Nomor 17 tentang keuangan negara dan undang-undang No. 32 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. Salah satu kebutuhan transparansi merupakan penyajian laporan keuangan dimana hal tersebut menjadi faktor pendukung

adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo,2006).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah rawan terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah tersebut, baik dari faktor internal maupun eksternal. Masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan sering kali terjadi dikarenakan kelalaian dalam perencanaan, pencatatan, ataupun faktor individu dari pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pelaksana mandat yang diberikan oleh masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalopran keuangan. Namun, tidak hanya pemerintah desa saja yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang ada di desa juga ikut berperan dalam kesuksesan perencanaan desa (Syahril,SE., M.Ak dan Bambang Hermanto, MM, 2019).

Salah satu faktor yang meningkatkan isu transparansi adalah maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Berbagai pelayanan publik rawan tercemar berbagai bentuk tindakan atau kegiatan yang tidak baik seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang korup seperti yang dijelaskan oleh *transparency international* dalam survey yang telah dilakukannya dari tahun 2006 sampai 2015. Namun, maraknya kasus korupsi dapat meningkatkan kesadaran pemerintah atas pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan (Nur Laili Yuliani, 2017).

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010) dan (Martini, Sari, & Wardhan, 2015).

Pengendalian internal dijadikan sebagai suatu sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga suatu proses kegiatan operasi dengan kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Pada suatu kegiatan pemerintah juga sangat dibutuhkan pengendalian internal yang bertujuan untuk menciptakan kinerja yang baik. Penerapan pengendalian internal pada kegiatan pemerintah ini dilakukan untuk mendapatkan suatu keyakinan terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) guna untuk mewujudkan sistem pengendalian internal pada pemerintahan. PP Nomor 60 Tahun 2008 mempertegas pelaksanaan pemantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa terciptanya SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dilatar belakangi oleh kegiatan yang di selenggarakan pada suatu instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan secara terkendali, efektif dan efisien. Secara umum, masalah yang kerap terjadi karena lemahnya pengendalian internal yaitu pada pengelolaan dana desa, seperti terjadinya korupsi, penggelapan dana desa, dan penyalahgunaan pajak.

Selain pengendalian internal yang dapat mempengaruhi transparansi dalam pelaporan keuangan desa yaitu tekanan eksternal. Tekanan eksternal dapat berasal dari regulasi lembaga yang lebih tinggi atau bisa juga dari masyarakat tentang transparansi laporan keuangan. Adanya tekanan eksternal yang dihadapi

dalam suatu organisasi pemerintahan desa juga sangat berpengaruh bagi transparansi pelaporan keuangan (Rian Noprizal, 2017).

Tekanan eksternal ini juga dapat menimbulkan adanya ketidakpastian lingkungan atau keadaan lingkungan yang dapat berubah-ubah seperti adanya peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya, perubahan peraturan (regulasi), juga dapat menyebabkan munculnya pengurangan staf yang begitu pesat (Ridha, 2012).

Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang kaitannya dekat dengan administrasi publik pemerintah. Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel apabila organisasi tersebut dapat menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi, termasuk dalam pembuat keputusan dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dalam peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban pada setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk didalamnya administrasi publik pemerintah, dan pelaksanaan dalam suatu lingkup kerja atau peran yang mencakup didalamnya mempunyai kewajiban untuk dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Hubungan antara akuntabilitas dengan tatakelola pemerintah yang baik sebenarnya sangat erat. Hal tersebut dapat digambarkan dengan adanya hubungan yang menyangkut tentang sekarang dan masa depan, antar individu, antar kelompok agar dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepentingan yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan bahwa tiap-tiap tindakan dan keputusan dapat

diterima atau ditolak bahkan dapat diberikan hukuman apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ada beberapa ciri pemerintah yang akuntabel (Rizal et al., 2018), yaitu :

1. Informasi tentang aktivitas pemerintahan dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat
2. Layanan yang diberikan kepada publik memuaskan
3. Kebijakan publik dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Memberikan ruang yang luas bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan
5. Dapat menjadi tempat yang dapat digunakan oleh publik untuk menilai pemerintah

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mendukung adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dua azas tersebut menjadi sangat penting karena dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah desa dengan cara menyediakan laporan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalah pahaman.

Komitmen organisasi merupakan bentuk perilaku seseorang terhadap suatu organisasi yang dapat dilihat dari loyalitas dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tersebut. Seseorang dapat dikatakan memiliki komitmen organisasi yang tinggi apabila orang tersebut memiliki ciri-ciri antara lain dapat menerima dan mempercayai apa yang menjadi tujuan dan nilai-nilai organisasi tersebut, memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja demi organisasi dan

memiliki keyakinan yang kuat untuk tetap mengikuti organisasi tersebut (Mathins dan Jackson, 2006; 122).

Sistem pemerintahan desa juga merupakan bentuk organisasi. Didalam organisasi tersebut terdapat individu-individu yang bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing. Dalam setiap individu tentunya memiliki keinginan yang berbeda-beda, namun, dengan adanya organisasi tersebut para anggota harus melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi pemerintahan desa juga bertanggungjawab terhadap transparansi pelaporan keuangan desa yang dimana para anggota dalam organisasi tersebutlah yang mengelolanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Giri Bimo Mukti (2018) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penerapan transparansi pada pelaporan keuangan desa merupakan salah satu kebutuhan yang harus dilakukan oleh PPKD (persatuan perangkat keuangan desa) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola keuangan desa agar dapat dipercaya oleh publik. Di kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah juga telah menerapkan transparansi pelaporan keuangan desa seperti sebagaimana mestinya. Masalah yang sering dihadapi dalam transparansi pelaporan keuangan desa di kabupaten Banjarnegara ini adalah mengenai regulasi yang sering berubah-ubah. Selain itu, faktor lain yang timbul dari pemerintah desa juga dapat menjadi hambatan bagi terlaksananya transparansi pelaporan keuangan desa. Namun, berdasarkan uraian diatas faktor yang dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan desa sangatlah

banyak. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan desa ini juga berpengaruh penting terhadap beberapa desa di kabupaten Banjaregara, Jawa tengah. Dengan menggunakan variabel pengendalian internal, tekanan eksternal, akuntabilitas dan komitmen organisasi sebagai variabel dependen yang diduga dapat mempengaruhi tranparansi pelaporan keuangan desa. Mengetahui laporan keuangan yang transparan menjadi sangat penting, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap beberapa desa di kabupaten Banjarnegara, jawa tengah.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Giri Bimo Mukti (2018) dengan judul “Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yang digunakan. Penelitian ini tidak menggunakan variabel ketidakpastian lingkungan karena dirasa tekanan eksternal dan pengendalian internal sudah dapat mewakili pengaruh atas perubahan-perubahan yang terjadi akibat ketidakpastian lingkungan. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada populasi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi organisasi perangkat daerah yang bekerja dalam lingkupkelurahan/desa di kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Eksternal, Akuntabilitas,**

dan Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah)".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan desa?
2. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan desa?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan desa?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan desa?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pelaporan keuangan desa
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan eksternal terhadap pelaporan keuangan desa
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi pelaporan keuangan desa

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen manajemen terhadap pelaporan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dalam bidang pemerintahan desa melalui transparansi pelaporan keuangan desa

2. Praktis

Penulis berhadapan penelitian ini dapat menambah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan desa serta dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.